



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI:

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3231>

IMPLEMENTASI *SMART VILLAGE* NUSANTARA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA KEMUNING KABUPATEN KARANGANYAR

Merry Dwi Cahyani¹, S. Agus Santoso²

Universitas Sebelas Maret ^{1,2}

mrry.dc@student.uns.ac.id¹ saguss@staff.uns.ac.id²

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 06 Juli 2023

Revised date: 15 November 2023

Accepted date: 14 November 2023

ABSTRACT

The gap and lack of equitable development between cities and villages in Indonesia are factors that cause various problems such as poverty, underdevelopment, and lack of job opportunities in rural areas. Public services that are still manual, the difficulty of accessing the internet network and the undeveloped community MSMEs are problems that exist in Kemuning Village. It takes seriousness in village development through innovative programs supported by technological developments to initiate the emergence of the smart village concept. The implementation of Smart Village Nusantara in Kemuning Village can bring significant changes to the progress of the village. However, this program has not been fully proven successful with the Kemuning Village IDM which has decreased in 2021. The purpose of this study is to analyze the problems faced by the Kemuning Village Government using Jones (1996) implementation theory where there are three important activities in the program implementation process, namely interpretation, organizing, and applications. The research method used descriptive qualitative with data obtained through observation, interviews, and documentation. The results showed that at each stage of the Smart Village Nusantara implementation process, it was not fully maximized. This is caused by various factors including the lack of public understanding of digital technology, the absence of SOPs and schedule of activities, uneven internet network access, and there are still obstacles in the applications used.

Keywords: implementation, smart village, village development

ABSTRAKSI

Kesenjangan dan kurangnya pemerataan pembangunan antara kota dan desa di Indonesia menjadi faktor yang menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan minimnya kesempatan kerja di perdesaan. Pelayanan publik yang masih manual, sulitnya mengakses jaringan internet serta tidak berkembangnya UMKM masyarakat menjadi permasalahan yang ada di Desa Kemuning. Perlu keseriusan dalam pembangunan desa melalui program-program inovatif yang didukung dengan perkembangan teknologi menginisiasi munculnya konsep *smart village*. Penerapan *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan desa. Namun, program ini belum sepenuhnya berhasil terbukti dengan IDM Desa Kemuning yang mengalami penurunan di tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Kemuning menggunakan teori implementasi Jones (1996) dimana terdapat tiga aktivitas penting dalam proses implementasi program yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tiap tahapan proses implementasi *Smart Village* Nusantara belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi digital, tidak adanya penetapan SOP dan jadwal kegiatan, akses jaringan internet yang belum merata, serta masih terdapat kendala pada aplikasi yang digunakan.

Kata kunci: implementasi, *smart village*, pembangunan desa

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar

dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional

di berbagai aspek guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, makmur, berkeadilan, berdaya saing, dan sejahtera. Salah satu fokus dari

tujuh agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Adanya kesenjangan antarwilayah salah satunya ditandai dengan tingginya angka kemiskinan di perdesaan dengan jumlah 15,37 juta penduduk miskin (13,1%) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin perkotaan yang tercatat sebanyak 12,18 juta orang (7,89%) (BPS, 2020).

Untuk mencapai pemerataan pembangunan wilayah, perhatian pembangunan di Indonesia sejatinya perlu diarahkan dengan berorientasi pada pembangunan desa. Keseriusan pemerintah dalam upaya pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri sehingga mampu mengembangkan potensi maupun aset yang dimiliki desanya sendiri ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya regulasi tersebut kedudukan desa semakin kuat dengan keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan menegaskan bahwa desa sebagai subyek pembangunan bukan hanya menjadi obyek pembangunan.

Dalam mendukung program prioritas nasional dalam hal pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi Kementerian Desa PDTT menetapkan sasaran dalam Rencana Strategis 2020-2024 yaitu mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan mendorong 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Salah satu strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut yaitu melalui digitalisasi perdesaan. Pembangunan desa melalui program-program inovatif yang didukung dengan perkembangan teknologi yang pesat memunculkan model pembangunan desa yang modern berbasis konsep *smart village*. Menurut Viswanadham & Vedula (2010:3) *smart village* merupakan sebuah layanan desa yang dikelola bersama oleh masyarakat desa dalam satu *platform* yang berisi segala aktivitas desa dengan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan efisien. Salah satu desa yang menerapkan *smart village* adalah Desa Kemuning.

Desa Kemuning menerapkan *Smart Village Nusantara* yang merupakan program inkubasi dari PT Telkom untuk pengembangan desa cerdas. Desa Kemuning memiliki potensi melimpah dan telah memenuhi aspek *actor*, *asset*, dan *arena* untuk dijadikan desa *piloting project Smart Village Nusantara*. Sebelum menggunakan konsep *smart*

village, pelayanan administratif di Desa Kemuning masih dilakukan dengan sistem manual yaitu masyarakat desa harus datang ke kantor kepala desa secara langsung. Masyarakat juga kesulitan untuk mengakses jaringan internet karena Desa Kemuning berada di wilayah pegunungan dengan infrastruktur yang kurang memadai. Pendapatan penduduk desa juga terbatas hanya dengan mengandalkan hasil panen dan perkebunan. Destinasi wisata dan produk hasil olahan penduduk desa juga belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Penerapan *Smart Village Nusantara* di Desa Kemuning cukup memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan desa. Pelaksanaan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat mulai tertata dan mengalami kemajuan di tengah wabah Covid-19. Berikut merupakan tampilan dari web *Smart Village Nusantara* yang dikelola oleh Pemerintah Desa Kemuning.



Gambar 1. 1 Tampilan Web Smart Village Nusantara Desa

Namun, dari kelima desa yang diterapkan *Smart Village Nusantara*. Desa Kemuning menjadi satu-satunya desa yang mengalami penurunan presentase IDM sebanyak 5,66 persen dari tahun 2020 sebesar 0,7884 menjadi 0,7462 di tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari data Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020-2021 di bawah ini:

Tabel 1. 1
Status Desa Piloting Smart Village Nusantara Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020-2021

No	Nama Desa	IDM		Presentase Kenaikan/Penurunan IDM
		2021	2020	
1	Pangandaran	0.9719	0.9719	0%
2	Palasari, Subang	0.8132	0.8132	0%
3	Kemuning, Karanganyar	0.7462	0.7884	(-)5,66%
4	Sambirejo, Sleman	0.6957	0.6957	0%
5	Ranupani, Lumajang	0.6111	0.6073	(+)0,62%

Sumber: Website resmi Kementerian Desa PDTT, <https://www.kemendes.go.id> (data diolah peneliti 2021)

Hal ini dikarenakan beberapa program *Smart Village Nusantara* yang diterapkan di Desa Kemuning masih belum mengalami perubahan. Salah satunya yaitu pelayanan simpeldesa atau dalam hal pengurusan administrasi/surat-menyurat masyarakat desa yang dirasa kurang maksimal. Masyarakat Desa Kemuning lebih memilih untuk datang langsung ke kantor desa dibandingkan untuk mengurus dari rumah menggunakan aplikasi di *smartphone* karena adanya perbedaan format surat yang ada di Simpeldesa dengan format surat yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Desa Kemuning sebagai lokus penelitian melalui *Smart Village Nusantara* bertujuan untuk mewujudkan desa mandiri dengan berbasis digital dalam meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Tulisan ini akan membahas 3 aspek yang dikemukakan oleh Jones (1996:166) bahwa implementasi merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan diimplementasikannya program, dimana terdapat tiga aktivitas penting dalam proses implementasi yaitu interpretasi, organisasi, dan aplikasi.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Dalam kehidupan bernegara, diperlukan sebuah komponen untuk mengatur kehidupan masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu agar tercipta kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bersama oleh karena itu pemerintahan suatu negara membuat suatu kebijakan publik. Dye (1987:3) mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments chooses to do or not to do*” atau kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih untuk dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Nugroho (2012:123) mengartikan kebijakan publik sebagai setiap keputusan yang dibuat untuk merealisasikan tujuan dari suatu negara. Pengertian kebijakan publik diungkapkan berbeda oleh Robert Eyestone (dalam

Winarno, 2008:15) yaitu sebagai suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Hal ini diartikan sebagai suatu *democratic governance* dimana dalam proses kebijakan publik terdapat interaksi antara negara dengan rakyatnya untuk mengatasi suatu permasalahan publik.

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan kebijakan publik memiliki arti serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah maupun lembaga lain untuk mencapai suatu tujuan maupun mengatasi masalah publik. Menurut Dunn (2003:25) tahapan kebijakan publik terdiri dari:

- 1) Penyusunan Agenda
- 2) Formulasi Kebijakan
- 3) Adopsi Kebijakan
- 4) Implementasi Kebijakan
- 5) Evaluasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik karena dari keseluruhan tahapan pembuatan kebijakan publik akan menampakkan hasilnya pada proses implementasi. Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008:146) mendefinisikan implementasi kebijakan dalam artian luas dilihat sebagai alat administrasi publik yang mengorganisasikan prosedur, aktor, sumber daya, teknik, serta organisasi secara bersama-sama dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan dari program atau kebijakan yang telah ditetapkan. Jones (1984:12) berpendapat bahwa implementasi kebijakan sebagai “*those activities directed toward putting a program into effect*” atau implementasi merupakan suatu proses memanifestasikan program sampai mendapatkan hasil atau output. Jones juga menambahkan bahwa implementasi kebijakan sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*” atau dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan unsur-unsur sumber daya, pelaksana, dana, maupun kemampuan operasional. Menurut Grindle (1980:7) mendefinisikan bahwa implementasi merupakan suatu proses tindakan administratif yang diteliti pada tingkat program tertentu.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, disimpulkan implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam sektor publik maupun swasta untuk melaksanakan suatu peraturan

perundang-undangan yang telah ditetapkan dan mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan dari adanya program tersebut.

Menurut Edward (dalam Subarsono, 2013:90-92) setidaknya ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh efektif tidaknya komunikasi yang terjadi antara implementor kebijakan dengan kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Pelaksanaan isi kebijakan publik juga harus didukung sumberdaya yang cukup dan memadai agar implementasi dapat berjalan efektif.

3) Disposisi

Disposisi merujuk pada watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti kejujuran, komitmen, maupun sifat demokratis.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan karena merupakan tempat para aktor atau implementor kebijakan. Dalam struktur organisasi terdapat dua aspek yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan struktur organisasi yang jelas.

Sedangkan proses implementasi program menurut Jones dalam Widodo (2008:89-94) terdapat tiga aktivitas penting antara lain:

1) Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas merupakan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan.

2) Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan pelaksana kebijakan, SOP, sumber daya keuangan dan peralatan, manajemen pelaksanaan program, serta jadwal kegiatan pelaksanaan kebijakan.

3) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata atau perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pembangunan Desa

Di Indonesia sebagian wilayahnya merupakan pedesaan memiliki kebudayaan dan potensi yang berbeda-beda. Pengertian desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adhisasmitha (2013:68) mengartikan pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam aspek penghasilan, lapangan kerja dan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia dengan memanfaatkan peluang atau sumber daya yang dimiliki desa.

Konsep *Smart Village*

Pemahaman tentang konsep *smart village* memiliki pandangan yang berbeda-beda. *European Network for Rural Development* (2019) mendefinisikan desa cerdas adalah daerah dan masyarakat pedesaan yang berupaya mengembangkan atau memanfaatkan peluang, potensi, aset, maupun kekuatan yang dimiliki desanya sendiri untuk meningkatkan pelayanan melalui teknologi informasi digital, inovasi, dan pengetahuan yang lebih luas. Sedangkan menurut *International Telecommunication Union* desa cerdas memiliki arti komunitas di daerah pedesaan yang memanfaatkan konektivitas digital, solusi, dan sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan dan transformasinya sendiri untuk mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan atau SDG's (ITU, 2020).

Penerapan konsep *smart village* diharapkan tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi saja namun juga mampu mendorong perkembangan desa dan kesejahteraan hidup yang layak bagi masyarakat desa dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk dapat mendiskripsikan fakta-fakta atau keadaan dari hasil temuan secara rinci, cermat, dan mendalam tentang

bagaimana implementasi *Smart Village* Nusantara dalam meningkatkan pembangunan Desa Kemuning. Dengan pendekatan ini peneliti akan memfokuskan pada proses implementasi *Smart Village* Nusantara dengan tiga tahapan yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi.

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan penelitian yaitu dengan *purposive sampling*. Alasan penggunaan teknik ini karena peneliti ingin secara langsung memilih informan yang akan diwawancarai namun tetap sejalan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Informan yang dipilih yaitu beberapa orang yang mengetahui maupun terlibat dalam pelaksanaan implementasi *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning sehingga dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam objek penelitian. Data sekunder data yang digunakan untuk mendukung data primer yang

Gambar 3. 1 Model Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman (1992)

berkenaan dengan penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data ini diperoleh dari dokumen, arsip, buku, artikel, internet, maupun jurnal yang berhubungan dengan implementasi *smart village nusantara* di Desa Kemuning.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian yaitu melalui:

1) Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatif dimana peneliti hanya sebagai pengamat objek penelitian dan tidak terlibat langsung dalam proses implementasi program *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning

2) Wawancara

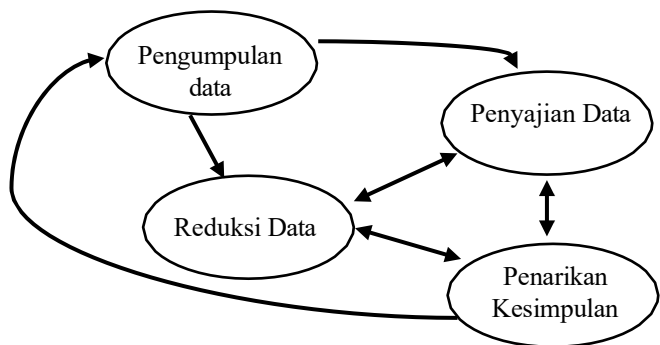
Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur yaitu dilakukan secara terbuka, tidak dalam suasana yang formal serta dapat dilakukan secara berulang terhadap informan yang sama. Dengan menggunakan teknik wawancara ini, maka peneliti dapat melakukan

improvisasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan tambahan terkait jawaban informan sehingga jawaban yang didapatkan tentang implementasi program *Smart Village* Nusantara dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Kemuning bisa lebih rinci dan mendalam.

3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan peneliti adalah berupa dokumen, web resmi, maupun tangkapan gambar langsung. Dokumentasi yang digunakan diantaranya, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202, web resmi *Smart Village* Nusantara Pemerintah Desa Kemuning, Laporan IDM Desa Kemuning Tahun 2021, APBDes Desa Kemuning Tahun 2021, maupun gambar yang didokumentasikan langsung oleh peneliti.

Untuk menguji validitas data penelitian peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dan teknis analisis kualitatif yang diterapkan merupakan model analisis interkatif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Sumber: Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2016:336)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kemuning merupakan salah satu desa dari 7 desa yang terletak di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Desa yang berada di dataran tinggi lereng Gunung Lawu bagian barat ini secara geografis memiliki luas wilayah 669,207 km² dengan letak topografisnya berada di ketinggian 800-1500m diatas permukaan laut (dpl). Berdasarkan letak geografisnya tersebut sebagian besar wilayah Desa Kemuning merupakan areal perkebunan dan pertanian karena memiliki

tanah yang subur. Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang hasil pertanian. Selain hasil pertanian, Desa Kemuning dikenal memiliki perkebunan teh yang luas sehingga menjadi ikon desa dan pemandangan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata.



Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Desa Kemuning menerapkan konsep *smart village* untuk memasarkan produk UMKM hasil olahan warga, wisata, maupun membenahi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan desa. Melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunan desa diharapkan Desa Kemuning dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek terutama dalam hal tata kelola desa, tata ekonomi, dan tata sosial desa. Penerapan *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning masih dalam tahap pengembangan sehingga masih perlu banyak penyesuaian dan perbaikan dalam proses implementasinya. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis proses implementasi *Smart Village* Nusantara dalam meningkatkan pembangunan Desa Kemuning dengan teori yang kemukakan oleh Jones (dalam Widodo, 2008:89-94) dengan tiga aktivitas penting. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan perangkat desa, pendamping *Smart Village* Nusantara dari PT Telkom, dan masyarakat Desa Kemuning diperoleh sebagai berikut:

1. Tahap Interpretasi

Pada tahap menginterpretasikan program ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang dilakukan oleh PT Telkom kepada Pemerintah

Desa Kemuning dan masyarakat desa. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perangkat desa terkait program *Smart Village* Nusantara ini mulai dilakukan sebelum program tersebut di *launching* secara resmi di Desa Kemuning. Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh PT Telkom dilakukan selama satu tahun. Materi yang diberikan kepada perangkat desa sebagai pelaksana diantaranya adalah gambaran tentang desa cerdas atau desa digital, cara membuka web maupun fitur yang ada, penggunaan internet dan fasilitas, serta penanganan masalah yang sifatnya mudah. Dalam proses sosialisasi dan pendampingan program *Smart Village* Nusantara diikuti oleh berbagai pihak diantaranya PT Telkom sebagai penyedia program inkubasi, Pemerintah Desa Kemuning sebagai pelaksana, lembaga desa, kelompok masyarakat desa seperti kelompok UMKM, Pokdarwis, BUMDes dan warga Desa Kemuning secara keseluruhan.

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan setiap kelompok usaha maupun warga Desa Kemuning mengirimkan perwakilan dua orang untuk tiap Rukun Tetangga (RT). Perwakilan yang terpilih dari tiap RT tersebut dibentuk sebagai Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bertugas untuk menginformasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan program *Smart Village* Nusantara kepada warga Desa Kemuning dan menjadi perantara antara pemerintah desa dengan masyarakat. Materi yang diberikan kepada kelompok masyarakat disesuaikan dengan fitur-fitur yang ada dalam program *Smart Village* Nusantara. Hal ini dimaksudkan agar semua fitur yang ada dalam program dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang tepat.

Meskipun demikian, dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kemuning diperoleh pemahaman masyarakat terkait *Smart Village* Nusantara masih kurang dan hanya sebatas tahu. Hal ini dikarenakan keterbatasan warga desa

terkait teknologi atau pemahaman baru dan tidak semua warga memiliki *gadget* atau *smartphone* untuk dapat mengakses aplikasi yang ada pada program.

2. Tahap Pengorganisasian

Penetapan dan pengaturan sumber daya, unit, dan metode dalam pelaksanaan *Smart Village* Nusantara dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pelaksana Kebijakan

Pihak yang bertindak sebagai pelaksana *Smart Village* Nusantara yaitu kepala desa beserta seluruh perangkat desa Desa Kemuning. Perangkat desa Desa Kemuning berkoordinasi langsung dengan PT Telkom sebagai penyedia dari program inkubasi, lembaga desa serta melibatkan kelompok sasaran yaitu masyarakat desa. Penetapan petugas dalam pelaksanaan *Smart Village* Nusantara dilakukan sesuai dengan fitur yang berhubungan dengan bidang-bidang yang ada di pemerintahan desa. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai operator adalah Kepala Urusan Perencanaan Desa Kemuning dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa lain. Tidak hanya internal Pemerintah Desa Kemuning, pelaksanaan *Smart Village* Nusantara juga melibatkan pihak eksternal. Pelaksanaan *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning didukung mulai dari jajaran pemerintah tinggi seperti Kementerian Desa dan PDTT, Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) hingga lembaga-lembaga dan kelompok masyarakat yang ada di Desa Kemuning seperti Pokdarwis, BUMDes dan seluruh masyarakat Desa Kemuning.

b. Standar Operating Procedure (SOP)

Daari hasil wawancara diketahui bahwa dalam penetapan SOP dilakukan oleh perusahaan yang berada di bawah naungan Telkom Group sesuai dengan fitur yang

dikembangkan dalam *Smart Village* Nusantara. Penyampaian petunjuk teknis maupun pelaksanaan terkait *Smart Village* Nusantara sudah disampaikan dalam sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan dengan Perangkat Desa Kemuning. Namun, pihak pemerintah desa tidak mengetahui terkait dengan SOP yang diberikan oleh PT Telkom terkait pelaksanaan *Smart Village* Nusantara. Sehingga dalam pelaksanaan *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning hanya berdasarkan pada pengetahuan teknologi yang dimiliki oleh operator *Smart Village* Nusantara.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Penetapan sumber daya keuangan untuk menunjang pelaksanaan *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemuning sejak tahun 2021. Penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk penambahan peralatan maupun infrastruktur yang diperlukan seperti tower internet dan pemasangan CCTV. Sedangkan pada tahun 2022, dana desa tidak dianggarkan untuk pengembangan *Smart Village* Nusantara dan hanya digunakan untuk pembiayaan operasional. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Kemuning ingin memaksimalkan penggunaan peralatan yang ada saat ini dan dapat dijadikan evaluasi untuk mengetahui kekurangannya. Peralatan guna menunjang pelaksanaan *Smart Village* Nusantara diberikan oleh PT Telkom seperti *triangle tower*, *smart pole*, *command center*, *repeater*, *Wi-Fi*, dan yang terpenting adalah jaringan internet.

d. Manajemen Pelaksanaan Program

Dalah hal ini merupakan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kemuning dengan pihak-pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan program *Smart Village* Nusantara. Koordinasi dalam internal Pemerintah Desa Kemuning dilakukan dengan rapat rutin yang dilakukan tiap minggu untuk mengevaluasi maupun mempersiapkan agenda yang akan dilakukan ke depannya. Sedangkan koordinasi yang dilakukan dengan PT Telkom dilakukan dengan monitoring melalui data yang terhubung langsung dengan sistem dan melalui aplikasi *Whatsapp group*. Pemerintah Desa Kemuning yang berperan sebagai koordinator dari seluruh proses pembangunan yang ada di Desa Kemuning termasuk dalam pemanfaatan program *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning menggerakkan seluruh aparatur desa untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan *Smart Village* Nusantara termasuk masyarakat.

e. Jadwal Kegiatan

Penetapan jadwal kegiatan *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning tidak ditetapkan secara baku namun tetap direncanakan dan dipersiapkan dengan matang di tiap tahunnya. Pemerintah Desa Kemuning juga menyusun perencanaan dengan target-target pengembangan dan pembangunan melalui pemanfaatan *Smart Village* Nusantara. Pada tahun 2020, kegiatan difokuskan pada persiapan *launching* sebagai *piloting project Smart Village* Nusantara. Selanjutnya merupakan pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program hingga pada tahun ini difokuskan pada *branding* desa wisata digital.

3. Tahap Aplikasi

Program *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning telah diimplementasikan hampir 2 tahun. Pengaplikasian program *Smart Village* Nusantara diawali dengan perencanaan di tahun

2019 dengan beberapa persiapan. Dalam implementasinya *Smart Village* Nusantara dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama, penyediaan konektivitas internet dan infrastruktur pendukung digital sebagai modal dasar dalam pengembangan desa digital. Dalam hal ini, PT Telkom sebagai penyedia program inkubasi memberikan infrastruktur kepada Pemerintah Desa Kemuning yang dalam pemasangannya juga melibatkan Diskominfo. Namun, dalam konektivitas jaringan internet belum semua wilayah Desa Kemuning yang terjangkau sinyal internet tersebut sehingga sebagian masyarakat Desa Kemuning masih belum bisa memanfaatkan fasilitas yang ada.

Kedua merupakan pemanfaatan TIK dalam tata kelola desa atau *smart government*. Pemanfaatan digital web dalam hal administrasi maupun pelayanan publik di desa diaplikasikan melalui aplikasi *Simpeldesa*, *e-Monev*, *User Central Management (UCM)*, dan *dashboard* desa. Pemanfaatan fitur tersebut dapat memberikan perubahan yang baik terhadap pengelolaan data desa. Namun dalam penerapannya, pelayanan administrasi masih terdapat masalah pada format surat yang berbeda antara yang ada di *simpeldesa* dan format yang berlaku di Pemda Kabupaten Karanganyar sehingga dirasa kurang maksimal.

Tahap ketiga merupakan peningkatan IT *literacy* masyarakat desa melalui pemanfaatan digital dalam aspek tata niaga dan tata sosial desa. Pemanfaatan teknologi digital dalam program *Smart Village* Nusantara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kemuning diantaranya yaitu *e-Lok* (elektronik loket), pasar desa atau grosir desa, kasir digital (*i-Kas*), dan pembayaran non tunai di tempat-tempat wisata ataupun UMKM. Penggunaan *e-Lok* dapat dirasakan manfaatnya dimana pencatatan transaksi dalam pengelolaan wisata di Desa Kemuning dapat tertata dan jelas baik dari segi jumlah pengunjung hingga keuangannya. Namun, fitur lain seperti pasar

desa yang digunakan untuk memasarkan produk UMKM para pelaku usaha masih belum maksimal dikarenakan jumlah pasaran yang sempit dan terbatas pada pengguna aplikasi simpeldesa saja. Penggunaan aplikasi i-Kas atau digital kasir juga sudah tidak digunakan lagi karena masyarakat masih menggunakan cara lama. Sedangkan dalam *smart society* terdapat fitur *e-posyandu*, *e-puskemas*, *pustaka digital (PaDi)*, serta *panic button* dan CCTV dalam hal keamanan desa. Dari fitur-fitur tersebut sudah diterapkan dan berguna bagi masyarakat, namun *e-puskesmas* masih belum berjalan dikarenakan data yang belum terintegrasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan.

Tahap terakhir merupakan seberapa besar pemanfaatan digital dapat bermanfaat di berbagai aspek kehidupan desa. Penggunaan fitur maupun aplikasi dirasa sudah cukup mudah untuk diakses bagi masyarakat dan jangkauan yang dapat menerima manfaat dari implementasi program ini dapat dirasakan pada aspek ekonomi dimana terbukanya lapangan pekerjaan maupun pendapatan dari hasil olahan produk karena jumlah kunjungan yang datang ke Desa Kemuning sebagai *pilotting project* dari program *Smart Village* Nusantara. Program ini juga dirasa masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dimana terdapat antusias yang tinggi masyarakat Desa Kemuning dalam mengajukan usulan untuk pengadaan fitur lain dalam program ini. Manfaat lain yang dapat dirasakan dari penerapan *Smart Village* Nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah dari data desa yang dapat dikelola dengan baik dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, implementasi *smart village* nusantara dalam meningkatkan pembangunan Desa Kemuning Kabupaten Karanganyar belum berjalan

secara maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya kurangnya pemahaman digital masyarakat, pelaksanaan tidak didasarkan pada SOP, kurang meluasnya konektivitas internet dan kendala-kendala di tiap fitur yang digunakan. Oleh karena itu, adapun saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait *Smart Village* Nusantara dengan lebih merata dan dengan cara yang mudah dimengerti seperti melalui media sosial ataupun papan informasi di tempat-tempat umum yang ada di Desa Kemuning.
2. Pelaksanaan *Smart Village* Nusantara perlu didasarkan pada SOP yang sudah ada. Perlu komunikasi lebih lanjut antara Pemerintah Desa Kemuning dengan PT Telkom untuk penyampaian SOP.
3. Perlu dilakukan penetapan jadwal kegiatan yang jelas dan lebih terstruktur agar pemanfaatan SVN dalam pembangunan Desa Kemuning dapat lebih efektif dan efisien.
4. Perlu diadakan kerjasama dan koordinasi antara PT Telkom, Pemerintah Desa Kemuning, dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait integrasi data yang dibutuhkan pada fitur yang ada di *Smart Village* Nusantara.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Presentase Penduduk Miskin Maret 2021 Turun Menjadi 10,14 Persen*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. 1987. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- ENRD. 2018. *Digital Villages Germany - Working document*. 1–4.
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_case-study_de.pdf

- Grindle, M. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton. New Jersey: University Press.
- Jones, C. O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Jones, C. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (R. Istamto (ed.)). Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nugroho, R. 2012. *Public Policy (Keempat)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabetha.
- Viswanadham, N., & Vedula, S. 2010. Design of Smart Villages. *The Centre for Global Logistics and Manufacturing Strategies*, 1–16. <https://gtl.csa.iisc.ac.in/nv/Mypublications/C/z.pdf>
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.